

**EVALUASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI  
DAERAH TERTINGGAL: STUDI KASUS KONDISI  
INFRASTRUKTUR DI KEPULAUAN MENTAWAI**

**Galuh Rizki Tarananda<sup>1</sup>, Amanda Fitria Najwa<sup>2</sup>, Dinda Rachma Aditya<sup>3</sup>, Devi Lusiany<sup>4</sup>, Rizqi Arfan Fanrisa<sup>5</sup>, Salma Amalia Amanda<sup>6</sup>, Ridho Ramadhinnov<sup>7</sup>, Sara Yogi<sup>8</sup>, Yulius Prasetyo Herlambang<sup>9</sup>**

[galuhrizki15@gmail.com](mailto:galuhrizki15@gmail.com)<sup>1</sup>, [mandafn369@gmail.com](mailto:mandafn369@gmail.com)<sup>2</sup>, [dindarachma128@gmail.com](mailto:dindarachma128@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[devilusyany02@gmail.com](mailto:devilusyany02@gmail.com)<sup>4</sup>, [afanrizki25@gmail.com](mailto:afanrizki25@gmail.com)<sup>5</sup>, [mandamel27@gmail.com](mailto:mandamel27@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[ridhoramadhinnov@gmail.com](mailto:ridhoramadhinnov@gmail.com)<sup>7</sup>, [sarayogi3731@gmail.com](mailto:sarayogi3731@gmail.com)<sup>8</sup>, [yuliusph127@gmail.com](mailto:yuliusph127@gmail.com)<sup>9</sup>,

**Universitas Tidar**

**Abstrak:** Otonomi daerah adalah konsep yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana otonomi daerah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait, seperti pejabat pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola temuan dan merumuskan kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan otonomi daerah bervariasi di berbagai daerah tertinggal. Beberapa daerah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan otonomi daerah dengan baik, sementara di daerah lain masih terdapat kendala dalam implementasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, masih adanya kendala dalam implementasi kebijakan dan regulasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.

**Kata Kunci:** Otonomi daerah, kesejahteraan masyarakat, daerah tertinggal, efektivitas, implementasi.

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Otonomi daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan pemerintah daerah otoritas yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan kebijakan di tingkat lokal. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terkait dengan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayahnya. Hal ini mencakup pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai aspek kehidupan Masyarakat.

Otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh Indonesia. Melalui otonomi daerah, diharapkan bahwa kebijakan dan program pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik unik dari setiap daerah, yang pada akhirnya akan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat pembangunan di tingkat lokal. Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, dengan memberikan ruang lebih besar bagi warga untuk terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak pada wilayah tempat tinggal mereka.

Daerah tertinggal merupakan wilayah yang mengalami keterbatasan dalam pembangunan, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun infrastruktur. Kondisi ini menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut cenderung rendah, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan pokok yang terbatas. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih leluasa dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Namun, pelaksanaan otonomi daerah di daerah tertinggal seringkali menghadapi tantangan tersendiri, seperti keterbatasan sumber daya, kapasitas pemerintah daerah, serta masalah-masalah sosial dan ekonomi yang kompleks.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal. Dengan mengevaluasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan otonomi daerah. Melalui evaluasi ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memahami sejauh mana otonomi daerah telah berhasil mencapai tujuan-tujuan pembangunan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan Masyarakat yang diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi dan kebijakan yang tepat untuk mempercepat pembangunan di daerah-daerah tertinggal, sehingga kesenjangan pembangunan antardaerah dapat diminimalkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggabungkan metodologi studi kasus dan studi literatur secara kualitatif. Untuk memahami secara utuh keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Mentawai, maka dipilihlah pendekatan kualitatif. Studi kasus digunakan untuk menganalisis secara deskriptif dan kualitatif data sekunder mengenai masalah infrastruktur di Mentawai untuk menggambarkan kondisi, kesulitan, dan upaya-upaya yang telah dilakukan. Sementara itu, untuk membuat kerangka konseptual dan menentukan inisiatif yang paling efektif dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan

infrastruktur, studi literatur dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan penelitian terdahulu mengenai kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, otonomi daerah, dan pengelolaan daerah tertinggal dari berbagai sumber yang dapat dipercaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Kepulauan Mentawai**

Kepulauan Kepulauan Mentawai adalah sebuah Kepulauan kepulauan yang terletak sekitar 150 kilometer dari kota Padang di pesisir barat Sumatera. Pulau-pulau utamanya adalah Pulau Siberut, Pulau Sipora, dan Pulau Pagai. Terdapat 43 desa dan 10 kecamatan yang tersebar di beberapa pulau tersebut. Wilayahnya yang berbukit- bukit dan hutan hujan tropis yang melimpah memberikan ciri khas geografisnya. Sebagian besar wilayahnya merupakan kepulauan dengan garis pantai yang panjang dan dikelilingi oleh perairan.

Mayoritas penduduk Kepulauan Kepulauan Mentawai terdiri dari suku Mentawai yang masih menjalankan adat istiadat dan tradisi nenek moyang mereka. Jumlah penduduk pada tahun 2020 diperkirakan hanya 86.000 jiwa, jumlah yang cukup kecil. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan masih mendominasi perekonomian Kepulauan ini. Karena budaya suku Mentawai yang khas dan lingkungan alam yang menakjubkan, ada potensi pariwisata yang signifikan. Namun, Kepulauan Mentawai masih kekurangan infrastruktur dasar, termasuk jalan yang buruk, akses transportasi laut yang terbatas, dan kurangnya fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Dari segi pariwisata, pertanian, dan perikanan, Kepulauan Kepulauan Mentawai memiliki banyak potensi. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya infrastruktur yang memadai, aksesibilitas terhadap transportasi, dan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Meskipun memiliki sumber daya.

alam dan budaya yang baik serta lokasi geografis yang unik, Kepulauan ini masih terbelakang, sehingga sulit untuk mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Kepulauan Mentawai ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020 pasal 2 ayat (1), yang mencantumkan tiga (3) syarat untuk mengidentifikasi daerah tertinggal, yaitu kekurangan di bidang infrastruktur, sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), serta karakteristik daerah yang khas di Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, Kepulauan Mentawai diklasifikasikan sebagai daerah tertinggal. Yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

### **Kondisi Infrastruktur Di Kepulauan Mentawai Dan Bagaimana Kesejahteraan Masyarakat Di Kepulauan Mentawai**

Kepulauan Mentawai disebut sebagai daerah tertinggal karena sudah memenuhi kriteria daerah tertinggal. Hal ini diukur melalui tingkat kemiskinan, akses terhadap Pendidikan, akses terhadap kesehatan, dan akses terhadap air bersih. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### **1. Terbatasnya Akses Transportasi**

Sebelum adanya pembangunan infrastruktur, akses menuju ke Kepulauan Mentawai sangat terbatas. Transportasi menggunakan jalur laut menjadi pilihan satu-satunya terhadap pendistribusian barang dan mobilitas masyarakat di Kepulauan Mentawai.

#### **2. Infrastruktur Jalan yang Kurang Memadai**

Kondisi infrastruktur jalan di Kepulauan Mentawai belum memadai karena banyak jalan yang rusak dan berlubang, bahkan ada yang belum diaspal. Hal ini mengakibatkan mobilitas barang dan konektivitas antar kecamatan di Kepulauan Mentawai terhambat.

Maka dari itu, kondisi infrastruktur di Kepulauan Mentawai harus ditingkatkan untuk kepentingan konektivitas dan mobilitas.

### 3. Kurangnya Fasilitas Kesehatan

Kurang memadainya infrastruktur jalan dan transportasi jalur laut berbanding lurus dengan kurangnya fasilitas kesehatan di Kepulauan Mentawai. Puskesmas tidak ada di semua kecamatan, hanya ada di kecamatan-kecamatan tertentu. Ketersediaan RSUD, puskesmas, dokter, dan obat-obatan di Kepulauan Mentawai masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan masyarakat sulit mengakses fasilitas kesehatan. Sarana air bersih di Kepulauan Mentawai juga belum memenuhi kualitas standar dan ketersediaannya juga sangat terbatas. Adapun angka stunting di Kepulauan Mentawai masih tinggi karena masyarakat memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan yang kurang bergizi. Maka dari itu, diperlukannya peningkatan fasilitas Kesehatan di Kepulauan Mentawai.

### 4. Kurangnya Fasilitas Pendidikan

Kepulauan Mentawai menghadapi masalah serius terkait fasilitas pendidikan yang tidak memadai, dengan banyak sekolah yang berada di daerah terpencil, akses yang sangat terbatas, dan bangunan sekolah yang rusak, serta kekurangan tenaga pengajar, sehingga menyebabkan banyak anak-anak di kepulauan ini tersisihkan dari fasilitas pendidikan dan putus sekolah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berkomitmen untuk mengatasi masalah ini dengan memperbaiki fasilitas pendidikan yang ada di Kepulauan Mentawai.

### 5. Pertumbuhan Ekonomi yang Stagnan

Kurang memadainya kondisi infrastruktur seperti jalan, transportasi laut, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan di Kepulauan Mentawai membuat pertumbuhan ekonomi di daerah ini stagnan. Masyarakat di Kepulauan Mentawai mengandalkan sektor perikanan dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, infrastruktur yang kurang memadai menyebabkan akses untuk menjual ikan dan hasil perkebunan ke pasar atau pusat-pusat ekonomi di Kepulauan Mentawai sangat terbatas, sehingga potensi ekonomi tidak dapat dimaksimalkan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kepulauan Mentawai juga masih rendah. Maka dari itu, kerja sama antara nelayan, petani, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu ditingkatkan agar pengolahan pascapanen dapat meningkat dan pemerintah perlu mengadakan pelatihan terhadap pelaku UMKM dalam mengelola produknya agar lebih menarik dan berdaya saing.

## **Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kepulauan Mentawai**

Implementasi otonomi daerah di Kepulauan Mentawai telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan infrastruktur di wilayah tersebut. Sejak Kepulauan Mentawai dinyatakan sebagai daerah tertinggal, pemerintah daerah telah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

### • **Sebelum adanya otonomi daerah**

Pada masa sebelum era otonomi daerah, Mentawai mengalami ketergantungan penuh terhadap pemerintah pusat dalam hal pembangunan infrastruktur. Hal ini dikarenakan Mentawai merupakan daerah yang tertinggal dan terisolasi, sehingga alokasi anggaran yang diberikan untuk pembangunan infrastruktur sangatlah minim. Kondisi infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas lainnya masih dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak memadai.

### • **Awal Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Pada saat dimulainya pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kepulauan Mentawai mendapatkan wewenang yang lebih besar dalam

merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu kapasitas fiskal yang terbatas serta keterbatasan sumber daya manusia. Akibatnya, perkembangan infrastruktur di daerah tersebut masih mengalami keterlambatan.

Kapasitas fiskal yang terbatas menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi perkembangan infrastruktur di Kepulauan Mentawai. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengalokasikan anggaran, namun jumlah anggaran yang tersedia terbatas. Hal ini menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam pengembangan infrastruktur di daerah tersebut. Kurangnya tenaga ahli dan keahlian yang memadai dalam bidang pembangunan infrastruktur menjadi hambatan dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan agar dapat mengatasi kendala ini.

#### • **Peningkatan Perhatian Pemerintah Pusat**

Pada masa ini, pemerintah pusat telah mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil, termasuk Mentawai. Program-program seperti Percepatan Pembangunan Daerah Terpencil (P2DTK) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah digunakan untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas infrastruktur lainnya di Mentawai. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Mentawai. Dengan adanya fasilitas infrastruktur yang memadai, seperti air bersih, listrik, dan telekomunikasi, masyarakat dapat mengakses layanan dasar dengan lebih mudah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah Mentawai secara keseluruhan.

Program Pembangunan jalan Trans Mentawai telah dimulai sejak tahun 2013. Kemajuan dalam pengerjaan dan pembukaan lahan untuk jalan tersebut menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pendekatan emosional yang dilakukan oleh tim Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang didukung oleh Bupati Kepulauan Mentawai telah berhasil membebaskan lahan untuk rencana

pembangunan jalan Trans Mentawai tanpa hambatan yang berarti. Jalan Trans Mentawai diharapkan dapat mempermudah akses mobilitas masyarakat setempat, terutama di empat pulau besar, yaitu Pulau Sipora, Pulau Siberut, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan. Menurut Kepala Dinas PU Kepulauan Kepulauan Mentawai, Ir. Elfi, MM, dari total panjang jalan Trans Mentawai sebesar 393,2 kilometer, hingga saat ini sudah berhasil membuka lahan sepanjang 292,1 Kilometer dalam bentuk jalan tanah, dengan 85,3 kilometer di antaranya sudah teraspal. Selain itu, sekitar 9,9 Kilometer jalan sudah dalam tahap pengerasan dengan penyebaran kerikil dan siap untuk diaspal. Total anggaran yang diperlukan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebesar lebih dari 700 miliar rupiah hingga pengerjaan selesai, yang ditargetkan pada awal tahun 2024 dan dapat dilalui oleh masyarakat. Pada tahun 2021 ini, diluncurkan dua paket pekerjaan baru dengan total panjang 89 kilometer.

Pembangunan jalan Trans Mentawai merupakan proyek yang penting dan strategis untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat di Kepulauan Mentawai. Diharapkan dengan adanya jalan ini, akses transportasi akan menjadi lebih mudah dan efisien, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah tersebut. Selain itu, pembangunan jalan Trans Mentawai juga diharapkan dapat

meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Dengan adanya jalan ini, masyarakat di Kepulauan Mentawai akan lebih mudah mengakses fasilitas-fasilitas tersebut tanpa harus menghadapi kendala aksesibilitas yang sulit.

• **Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Saat ini, implementasi otonomi daerah di Mentawai telah berlangsung dengan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran melalui program-program khusus, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan wilayah. Kolaborasi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Mentawai menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan keterlibatan aktif pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pada sekitar tahun 2022-2023, Terlaksananya Program perbaikan dan pengembangan pelabuhan laut Dermaga atau Pelabuhan Kapal Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara sebagai etalase atau pintu masuk pusat Kepulauan Kepulauan Mentawai. Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran pengerjaan penambahan panjang dermaga Tuapejat sepanjang 50 Meter dari panjang sebelumnya hanya 70 Meter x 8 Meter dengan alokasi anggaran sebesar Rp 27 miliar. Selain penambahan panjang dermaga, gapura, dan pembangunan terminal penumpang, Dermaga Tuapejat juga dihiasi dengan landmark bertuliskan Pelabuhan Tuapejat. Kawasan ini menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang ingin mengabadikan landmark tersebut, terutama pada malam hari. Perbaikan ini diharapkan memberikan kesan yang memukau bagi pengunjung, sesuai dengan status Mentawai sebagai daerah tujuan wisata kelas dunia. Dengan adanya peningkatan fasilitas dan penambahan panjang dermaga, diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut dan memberikan dampak positif bagi perekonomian setempat.

Langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi otonomi daerah di Mentawai menunjukkan komitmen yang kuat untuk memajukan daerah tersebut. Dengan adanya sinergi antara kedua pihak, diharapkan pembangunan di Mentawai dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Terdapat beberapa pencapaian yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur di Mentawai. Salah satu capaian penting adalah peningkatan aksesibilitas transportasi di pulau ini. Dengan adanya pembangunan jalan raya yang lebih baik, penduduk Mentawai kini dapat dengan mudah mengakses berbagai wilayah di pulau ini. Hal ini tidak hanya mempermudah mobilitas penduduk, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di daerah ini. Terdapat sejumlah sarana jalan yang tersedia dalam kondisi yang baik sepanjang 107,9 km atau sekitar 9,54 persen dari total jalan yang tersedia. Namun, terdapat juga sebagian jalan yang mengalami kerusakan berat dengan panjang sekitar 405,4 km atau sekitar 35,86 persen dari total panjang jalan yang

tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah jalan yang membutuhkan perbaikan agar dapat digunakan dengan aman dan lancar.

Pencapaian juga terjadi dalam perbaikan dan pengembangan pelabuhan laut. Terdapat lima pelabuhan laut di wilayah tersebut, yaitu Pelabuhan Tuapejat, Pelabuhan Sioban, Pelabuhan Sikakap, Pelabuhan Sikabalu, dan Pelabuhan Maileppet. Kelima pelabuhan ini merupakan jalur pelayaran yang dapat digunakan untuk perjalanan dari Padang ke Mentawai dengan rute yang telah dijadwalkan. Pelayaran ini dilayani oleh tiga

kapal ASDP, yaitu KMP Gambolo, KMP Ambu-Ambu, dan KMP Tanjung Burang, serta dua unit kapal Mentawai Fast. Selain itu, terdapat pelayaran antar pulau di wilayah Kepulauan Mentawai yang juga tersedia untuk masyarakat. Terdapat 154 kapal penyeberangan antar pulau yang melayani rute-rute tertentu di wilayah tersebut. Beberapa di antaranya adalah KM Simasin, KM Nade, KM Beriloga, KM Simatalu, LCT Teluk Katurei, dan KM Bakkat Menuang.<sup>6</sup> Pelayaran antar pulau ini juga memiliki jadwal yang telah ditentukan untuk memudahkan perjalanan. Dengan adanya berbagai pilihan kapal dan pelabuhan laut yang tersedia, pelayaran antar pulau di wilayah Kepulauan Mentawai menjadi lebih terorganisir dan terjadwal. Hal ini memudahkan masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dari Padang ke Mentawai atau antar pulau di wilayah tersebut. Dengan demikian, akses transportasi laut di wilayah tersebut menjadi lebih lancar dan teratur bagi para penumpang yang membutuhkan layanan pelayaran.

Selain itu, pembangunan infrastruktur di Mentawai juga mencakup peningkatan akses terhadap air bersih dan listrik. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah membangun sistem penyediaan air bersih yang lebih baik, sehingga penduduk Mentawai kini memiliki akses yang lebih baik terhadap air bersih yang aman dan sehat. Data menunjukkan bahwa sekitar 55,46 persen rumah tangga masih menggunakan air bersih secara agregat. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat kebutuhan akan air bersih akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Oleh karena itu, diperlukan upaya ekstra untuk memastikan cakupan dan kualitas pelayanan air minum sesuai dengan harapan masyarakat. Pemerintah Kepulauan Kepulauan Mentawai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk wilayah yang mencakup 10 kecamatan. Langkah ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat setempat. Dengan adanya upaya ini, diharapkan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih secara agregat dapat meningkat secara signifikan.

Selain itu, pembangunan pembangkit listrik juga telah dilakukan untuk memastikan pasokan listrik yang stabil dan terjangkau bagi penduduk Mentawai. Tingkat elektrifikasi di Kepulauan Mentawai pada tahun 2021 masih tergolong rendah, yakni sekitar 83,72 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala utama, di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur jalan yang masih sangat terbatas serta kemampuan ekonomi masyarakat calon pelanggan yang tidak mampu membayar biaya penyambungan listrik. Dengan jumlah pelanggan PLN yang tercatat sebanyak 14.717 pelanggan, terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan akses listrik di daerah tersebut. Meskipun beberapa wilayah seperti Tuapejat, Sioban, Sikakap, Muara Siberut, dan Sikabalu telah memiliki layanan PLN yang beroperasi selama 24 jam, namun masih terdapat daerah lain di Kepulauan Mentawai yang hanya mendapatkan pasokan listrik sekitar 10-12 jam per hari. Oleh karena itu, pengembangan sektor energi terutama energi baru dan terbarukan menjadi alternatif pilihan yang penting dalam rangka pembangunan energi yang berkelanjutan.<sup>7</sup>

Dalam konteks ini, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) telah menetapkan target bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 23% hingga tahun 2025. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk terus mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang guna meningkatkan elektrifikasi di Kepulauan Mentawai dan mencapai tujuan pembangunan energi yang berkelanjutan di masa depan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat, penting untuk mencari sumber energi terbarukan sebagai alternatif untuk

mengatasi keterbatasan daya tampung aliran listrik konvensional. Kepulauan Kepulauan Mentawai memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan, seperti energi biomassa dari bambu atau sampah (biogas), Pembangkit Listrik

Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLMTH), dan pembangkit listrik tenaga gelombang laut.<sup>8</sup>

Pencapaian lainnya dalam pembangunan infrastruktur di Mentawai adalah peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah telah membangun pusat kesehatan dan sekolah-sekolah yang lebih baik di pulau ini. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memungkinkan penduduk Mentawai untuk mendapatkan akses yang lebih mudah dan lebih dekat dengan fasilitas-fasilitas tersebut. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan kualitas hidup penduduk Mentawai dapat terus meningkat.

Walaupun begitu, masih ada beberapa hambatan yang perlu diatasi dalam pembangunan infrastruktur di Mentawai. Tantangan tersebut antara lain adalah keterbatasan anggaran yang tersedia, kondisi geografis yang sulit, serta masalah koordinasi antar tingkat pemerintahan yang masih perlu ditingkatkan. Semua hal ini memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak agar pembangunan infrastruktur di daerah tersebut dapat berjalan dengan lebih efisien dan optimal.

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan infrastruktur di Mentawai. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah daerah perlu mencari solusi kreatif untuk memaksimalkan penggunaan dana yang ada. Selain itu, kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga keuangan juga dapat menjadi alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih baik di daerah tersebut.

Selain keterbatasan anggaran, sulitnya kondisi geografis di Mentawai juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan topografi yang beragam dan sulit dijangkau, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya menjadi lebih rumit. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan kerjasama lintas sektor sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan pembangunan infrastruktur di Mentawai dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

### **Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Mentawai Saat Ini, Dan Peran Pemerintah Serta Masyarakat Untuk Menjaga Keseimbangan/Pengembangan Daerah Mentawai Ke Setelah Infrastruktur Yang Telah Membaik**

Pembangunan infrastruktur di Indonesia pada umumnya ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti transportasi, energi, air bersih, dan komunikasi. Hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas, mobilitas dan peluang ekonomi. Namun perlu diingat bahwa pembangunan infrastruktur saja tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor lain seperti pendidikan, kesehatan, akses terhadap pekerjaan dan perlindungan sosial juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan dan infrastruktur masyarakat Mentawai secara otomatis akan meningkatkan perekonomian masyarakat Mentawai. Pembangunan wilayah Mentawai bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan wilayah Mentawai yang merupakan wilayah tertinggal. Memang benar bahwa pembangunan infrastruktur berarti peningkatan kesejahteraan manusia. Di bidang perekonomian, secara bertahap dibangun sistem perekonomian seperti pembangunan pasar Burasat, namun belum banyak kemajuan yang dicapai. Pemerintah terus berupaya menghadirkan perubahan, antara lain pembangunan landasan udara sepanjang 1,6 km oleh Kementerian Perhubungan di Mentawai, pembebasan lahan oleh pemerintah daerah, dan program pengentasan kemiskinan 3T untuk daerah tertinggal, terpencil, dan ekstrem.

Bupati Kepulauan Mentawai mengatakan, pihaknya telah berhasil membangun 2.072 gedung, beberapa di antaranya masih dalam tahap penyelesaian. Gambaran perkembangan



76 unit di Hantap Shikakapu dan 447 unit di Pagai Utara yang sudah dihuni oleh Desa Taikako, Bethumonga dan Saumanganya. Sedangkan akomodasi yang belum berpenghuni berada di Desa Shirabu, yakni Desa Shirabu Utara dan Desa Shirabu Selatan. Di Pagai Selatan terdapat 936 KK, yaitu 62 KK dari 31 KK di Desa Matar, 58 KK dari 32 KK di Desa Bere, dan 33 KK dari 31 KK di Desa Rokudou Oinan. Dengan dibukanya akses jalan dan dibangunnya tiga jembatan, kedua warga ini.

bersama warga lainnya kini mendapat kemudahan akses roda dua menuju ladang yang dilalui jalan tersebut. Dahulu kala, wilayah ini terdiri dari rawa-rawa, hutan, dan sungai curam yang hanya bisa dilintasi dengan berjalan kaki.

Perkembangan selanjutnya juga terlihat pada peningkatan akses internet. Masyarakat di Kepulauan Mentawai kini memiliki akses layanan internet dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di Desa Brasat, Maracopa, Kepulauan Mentawai. BAKTI Kominfo tidak hanya menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan akses internet, tetapi juga memperkuat sumber daya manusia dan ekosistem digital melalui unit South Sipola Hantap 613 di Desa Bosua dan Beliulou di Dusun. Upaya pengembangan sumber daya manusia telah dilakukan sejak tahun 2018. BAKTI Kominfo meningkatkan literasi digital melalui penggunaan aplikasi pembelajaran bahasa Inggris online BAHASO.

Perbaikan infrastruktur juga berdampak pada ketersediaan listrik dan, pada gilirannya, juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal. Ketersediaan listrik akan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kepulauan Mentawai. Rumah tangga yang mempunyai listrik akan lebih baik dibandingkan rumah tangga yang tidak mempunyai listrik. Apalagi di saat seperti ini, ketersediaan listrik sendiri sudah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat mendesak dan perlu untuk diputuskan dari kehidupan sehari-hari di rumah, termasuk penerangan rumah tangga, menyalakan perangkat elektronik. Ketersediaan listrik tidak hanya memperlancar aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penunjang pendidikan, seperti melalui penggunaan laptop, komputer, dan internet yang mengandalkan listrik untuk pembelajaran, maka tingkat pendidikan dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat meningkat.

Ketersediaan listrik mempengaruhi prestasi akademik anggota rumah tangga, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Terdapat hubungan dua arah antara kualitas listrik dan pendapatan, dan pendapatan merupakan indikator kesejahteraan. Artinya pendapatan dapat mempengaruhi sambungan listrik suatu rumah tangga dan sebaliknya. Dengan kata lain, sambungan listrik suatu rumah tangga juga akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga tersebut, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kesejahterannya. Maka dapat dilihat bahwa ketersediaan listrik sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat karena ketersediaan listrik dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Dalam kasus lain, hal ini berdampak pada air bersih. Akses terhadap air bersih mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Keluarga yang memiliki air bersih lebih baik dibandingkan keluarga yang tidak memiliki air bersih. Akses terhadap air bersih juga merupakan kebutuhan pokok dan peranannya sangat penting dalam aktivitas rumah tangga sehari-hari seperti minum, mencuci, memasak dan aktivitas lainnya. Tanpa air bersih di rumah Anda, Anda akan sulit melakukan aktivitas sehari-hari dan waktu luang Anda akan terbuang untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Rumah tangga sangat membutuhkan air bersih, dan air bersih dapat mencegah berbagai penyakit yang membahayakan kesehatan keluarga Anda. Air bersih meningkatkan prestasi akademis anak-anak dan pada akhirnya meningkatkan

kesejahteraan rumah tangga. Air bersih mengurangi risiko penyakit, sehingga meningkatkan harapan hidup dan kebahagiaan. Bahwa kehadiran infrastruktur air bersih dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat; Infrastruktur air bersih dapat mencegah berbagai penyakit akibat air kotor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi ekonomi, guna meningkatkan pendapatan masyarakat dari pariwisata, pemerintah Kepulauan Mentawai melaksanakan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan produksi seni (pembuatan aksesoris Mentawa) dan pelatihan bisnis (pembuatan aksesoris Mentawa) bisa diperjualbelikan untuk menambah pendapatan masyarakat Mentawai. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk upaya implementasi khusus dalam perencanaan pembangunan, memberikan petunjuk dan arahan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menetapkan dan mencapai tujuannya. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga menjadi pedoman penyusunan dokumen RPJMD dan penetapan tahapan pembangunan selama lima tahun masa jabatan kepala daerah untuk mencapai tujuan RPJMD secara bertahap. Perkembangan industri pariwisata memerlukan suatu sistem yang mendukung pembangunan. Hal ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat Mentawai melalui penciptaan pariwisata daerah.

Kegiatan pariwisata didukung dengan adanya fasilitas pariwisata Kepulauan Mentawai yang tersedia bagi wisatawan yang berkunjung ke pariwisata Kepulauan Mentawai. Selain fasilitas pendukung, terdapat juga fasilitas pendukung seperti hotel dan fasilitas penginapan bagi wisatawan yang berkunjung ke Mentawai. Jalan dibangun untuk memudahkan wisatawan mengakses tempat wisata.

Transportasi merupakan hal yang sangat penting ketika hendak menuju tempat wisata. Dengan adanya transportasi, wisatawan dapat dengan mudah mengunjungi tempat wisata. Di Mentawai, terdapat berbagai pilihan transportasi yang tersedia bagi wisatawan untuk mencapai tempat wisata. Untuk menuju Mentawai sendiri, Anda bisa menaiki kapal Mentawai Express dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam. Setibanya di Dermaga Mentawai (Tuapejat), terdapat biro perjalanan yang akan mengantarkan wisatawan menuju tempat wisata tersebut. Selain kapal laut, saat ini juga sudah digunakan pesawat meskipun belum diresmikan oleh presiden. Hadirnya penerbangan ke Mentawai akan memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke Mentawai.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023, terlihat kemajuan di Kepulauan Mentawai dengan tidak adanya Desa Sangat Tertinggal, serta peningkatan jumlah desa berstatus Maju dan Mandiri. Meski begitu, masih terdapat 8 desa yang berstatus Tertinggal. Oleh karena itu, Gubernur berharap melalui Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) yang digelar langsung di Mentawai, akan dihasilkan strategi dan rencana aksi yang komprehensif untuk mengentaskan berbagai permasalahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, termasuk ketertinggalan di 8 desa tersebut.

Untuk membangun struktur yang kuat dan bermanfaat di wilayah Mentawai, kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan industri diperlukan guna memastikan kualitas pembangunan infrastruktur sesuai tujuan dan berfungsi dengan baik. Pembangunan infrastruktur di Kepulauan Mentawai akan terus berkembang seiring dengan kerja sama semua pihak untuk mengembangkan pariwisata di kepulauan tersebut. Setelah infrastruktur membaik, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga keseimbangan serta pengembangan daerah Mentawai secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu:

1. Pemerintah dapat berperan penting dalam pengembangan sektor perekonomian lokal Kepulauan Kepulauan Mentawai. Pendekatan pembangunan berkelanjutan memungkinkan kita menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial. Hal ini

mendorong pemerataan pendapatan masyarakat. Tujuannya untuk membantu masyarakat kurang mampu secara ekonomi agar tidak terdesak. Hal ini dapat dicapai melalui langkah-langkah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara konsisten.

2. Masyarakat dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan wilayah Mentawai. Dengan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat dapat lebih menerima keputusan pemerintah dan berkontribusi dalam menjaga keseimbangan dan pembangunan daerah. Hal ini juga berlaku dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah dapat berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Mentawai. Hal ini mencakup perlindungan dan konservasi alam dan lingkungan daerah penangkapan ikan. Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan dan peraturan yang menjamin keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan.
3. Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dengan membentuk suatu komunitas melalui pendidikan kewarganegaraan dan penguatan semangat patriotisme serta bela negara. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam menjaga lingkungan dan melestarikan budaya dan kearifan lokal.
4. Masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga keseimbangan dan pembangunan wilayah Mentawai dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup. Masyarakat juga dapat berperan dalam penanggulangan bencana di wilayah Mentawai dengan meningkatkan kesadaran akan risiko bencana, mengembangkan budaya sadar bencana, dan berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana.

## **KESIMPULAN**

Efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal adalah sebuah tantangan yang kompleks. Meskipun konsep otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya, namun implementasinya sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan. Studi ini menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam efektivitas pelaksanaan otonomi daerah di berbagai daerah tertinggal. Beberapa daerah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan otonomi daerah secara efektif, sementara di daerah lain masih terdapat kendala yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah meliputi kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan Keputusan serta dukungan dan koordinasi dari pemerintah pusat.

Urgensi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah di daerah tertinggal sangatlah penting mengingat kondisi sosial-ekonomi yang masih rendah di beberapa daerah tersebut. Otonomi daerah memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen yang efektif.

dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Namun, untuk mengoptimalkan kontribusinya, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, memperkuat koordinasi antarinstansi, dan memanfaatkan teknologi dan inovasi secara optimal. Dengan meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan dapat tercapai pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kesenjangan antardaerah dapat diminimalkan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal dapat ditingkatkan secara signifikan..

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akmalia, J., & Tanjung, M. S. B. (2020). Analisis Kinerja Keuangan, Kemampuan Keuangan Dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kepulauan Sijunjung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1-20.
- Fadhilah, A. N., Tamrin, T., & Rusta, A. (2023). STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PERIODE 2017-2022. *Jurnal Suara Politik*, 2(1).
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119-136.
- Ilahi, F. M., & Ariusni, A. (2020). Pengaruh Fasilitas Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 2(2), 55-60.
- Ilahi, F., & Ariusni, A. (2020). Pengaruh Fasilitas Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*.
- Marsidik, M. Y., Somantri, N., Widyanto, S., Herdiani, I., Ilham, M., Almatin, A. A., . . . Raharjo, S. (2023). STRATEGI KOLABORASI PENGEMBANGAN WILAYAH KEPULAUAN DAN PULAU KECIL TERLUAR DI DAERAH TERTINGGAL: Studi Kasus kabupaten Kepulauan Mentawai. *Policy Paper Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*.
- Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. *Fiat Justisia*, 8(1), 69-79.
- Sanur, L. A., Haris, M. A., & Fauzi, F. (2024). Kalsifikasi Status esejahteraan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Metode Regresi Logistik Biner dan CART. *Jurnal Matematika dan Statistika dan Terapannya*.
- WEBSITE
- (2016, april 13). Diambil kembali dari <https://bnpb.go.id/berita/huntap-dan-infrastruktur-meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat-mentawai>
- (2019, april 11). Retrieved from Indonesia Terkoneksi : [https://www.kominfo.go.id/content/detail/17880/bupati-kepulauan-mentawai-akses-internet-buat-layanan-membaik/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/17880/bupati-kepulauan-mentawai-akses-internet-buat-layanan-membaik/0/berita_satker)
- AjarDetik.com. (2023, April 17). Menteri Pendidikan Janji akan Dirikan Asrama Anak Didik di Mentawai. Retrieved from JARDETIK: <https://www.ajardetik.com>
- BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. (2022). RKPDP KEPULAUAN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023. Retrieved from [http://jdih.mentawaikab.go.id/images/2023/02/2022\\_Perbup\\_Kepmentawaikab\\_24.pd](http://jdih.mentawaikab.go.id/images/2023/02/2022_Perbup_Kepmentawaikab_24.pd) f#page=19.10
- Mariadi, O. (2017, Juli 1). Program Tol Laut, KM Tarex Layani Mentawai-Tanjung Priok. Retrieved from MentawaiKita: <https://www.mentawaikita.com>
- Mimbarsumbar. (2021, March 12). Elfi: Ditargetkan Selesai 2024, Pembukaan Lahan Jalan Trans Mentawai Nyaris Tanpa Hambatan. Retrieved from <https://mimbarsumbar.id/elfi-ditargetkan-selesai-2024-pembukaan-lahan-jalan-trans-mentawai-nyaris-tanpa-hambatan/>
- Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. (2023, Januari 30). Pemkab Kepulauan Mentawai Belajar Penuruna Stunting ke Pemerintah Kabupate Solok. Retrieved from Pemerintah Daerah Kabupaten Solok: <https://solokkab.go.id/>
- Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai. (2017). RPJPD Kab. Kep. Mentawai 2005-2025. Retrieved from <https://webs.smartech.co.id/mentawai/wp-content/uploads/download/pdf-files/RPJPD-2005-2025.pdf>
- Selvia, N. (2022, December 28). Makin Cantik, Pelabuhan Tuapejat Berbenah. Retrieved from <https://padek.jawapos.com/mentawai/2363757299/makin-cantik-pelabuhan-tuapejat-berbenah>